DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN (DIM)
TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023

NO	URAIAN	KETERANGAN
A. PERMASALAHAN		
BIDANG PDL		
1	**Pajak Hotel**	
	Pemkab Gresik belum membuat aturan sanksi bagi wajib pajak yang melaporkan pada alat perekam transaksi tidak realtime atau H+1	Permasalahan dimaksud sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik, hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan
2	**Pajak Restoran**	
	Pemkab Gresik belum membuat aturan sanksi bagi wajib pajak yang melaporkan omset pada alat perekam transaksi tidak realtime atau H+1	Permasalahan dimaksud sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik, hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan
	Adanya wajib pajak yang belum memungut pajak 10% kepada konsumen dan pelaporan pajak flat (tidak sesuai dengan omzet)	
	Adanya wajib pajak yang tidak bersedia untuk dipasang alat perekam transaksi	
3	**Pajak Hiburan**	
	untuk hiburan, parkir, ABT dan Reklame Insidentil ditempat tertentu (dalam wilayah desa) yang tidak mau ditarik pajaknya	Permasalahan dimaksud sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik, hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan
4	**Pajak Parkir**	
	Adanya beberapa pengelola yang tidak melaporkan omset secara real dan menarik diatas tarif yang ditentukan	Permasalahan dimaksud sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik, hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan
5	**Pajak Reklame**	
	Perlu adanya kajian penyesuaian tentang dasar pengenaan pajak reklame, terakhir Perbub. No. 17 Th. 2014	Permasalahan dimaksud sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik, hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan
6	**Pajak MBLB**	
	Dasar pengenaan pajak MBLB perlu kajian, apa berdasarkan DO (Delivery Order) atau Ritase (armada/m3)	Permasalahan dimaksud sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik, hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan
7	**Pajak Air Tanah**	
	Adanya penguna air tanah yang belum memiliki ijin SIPA dan belum memasang meteran	Permasalahan dimaksud sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik, hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan
BIDANG PBB		
1	**Pajak PBB P2 & BPHTB**	
	masih adanya NOP yang tidak ada objeknya	PBB-P2 perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara melakukan sensus atau pengecekan ulang mengenai objek pajak (terkait dengan NJOP)
	Pemilik objek pajak tidak berdomisili di daerah tersebut	
B. POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM DIGALI		
1	belum diaturnya tarif khusus mengenai ketinggian tiang pada reklame	
2	adanya tarif khusus untuk iklan rokok	

DAFTAR INVETARISASI PERMASALAHAN (DIM)
TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023
DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	URAIAN	KETERANGAN
UPT IPLT		
A. PERMASALAHAN		
UPT. PENGELOLAAN PASAR		
1	Belum optimalnya penerapan perda nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik	penerapan sanksi dan pengawasan belum bisa dilakukan
		Kapasitas IPLT eksisting terbatas dibandingkan dengan pelayanan yang harus diberikan(Kapasitas desain 45 m3. di sisi lain potensi pengolahan lumpur tinja sektor niaga disekitar IPLT mencapai 120m3/hari)
		Pelaksanaan sosialisasi tentang sanitasi aman untuk meningkatkan peran serta masyarakat belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena terbatasnya anggaran
2	Perbup turunan perda sebagai pedoman pelaksanaan teknis belum smuanya tersusun(terdapat 9 pasal pada perda no 9 tahun 2018 yang harus diturunkan kedalam perbup, antara lain Rencana induk sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik(SPALD); kerjasama penyelenggaraan SPALD; mekanisme dan syarat bantuan pembiayaan pemasangan sambungan SPALD terpusat bagi MBR; Perubahan struktur dan besaran tarif PALD Zonasi Layanan; Pembangunan Konstruksi SPALD; Pembangunan unit pengolahan setempat(individu dan komunal yang tidak terjangkau SPALD terpusat);pemanfaatan Efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan; tata cara pemberian sanksi administratif; pelaksanaan perda kabupaten gresik no 9 tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik(tambahan dari tim ahli)	2 draft turunan perda sudah di Bagian Hukum, namun belum disahkan(Ranperbup ttg pelaksanaan perda no 9 tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik dan ranperbbup ttg pedoman penyusunan rencana induk sistem pengelolaan ait limbah)
B. POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM DIGALI		
1	Pemanfaatan hasil olahan lumpur tinja berupa lumpur tinja kering yang belum bisa dimanfaatkan	
2	Penerapan L2T2 pada aparatur sipil negara belum berjalan	Surat himbauan masih dalam proses penyusunan
3	Tarif pemanfaatan toilet caravan belum diatu, sehingga penggunaan saat ini belum di pungut biaya	
4	Kenaikan tarif retribusi	
UPT RUSUNAWA		
A. PERMASALAHAN		
1	Masih banyaknya hunian/kios yang kosong	Kurang adanya peminat, karena kondisi kurang layak
2	instalasi air PDAM belum terpenuhi secara maksimal	Debit air yang keluar di rusunawa gulomantung kurang maksimal dan pihak pengelola sudah koordinasi dengan PDAM
		Rusunawa bambe sampai hari ini masih menggunakan air tangkian karena belum adanya air PDAM yang masuk(instalasi sudah ada namun karena debitnya air di driyorejo belum terpenuhi seluruhnya
3	Lokasi jalan masuk ke rusunawa jauh	Semua rusunawa hampir mengalami kerusakan berat, sedang maupun ringan kecuali rusunawa karangturi, sehingga kurang peminat karena tidak layak huni
4	Masik banyaknya kebocoran hunian yang belum ditangani karena terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan gedung	

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN (DIM)
TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023
DINAS PERIKANAN

NO	URAIAN	KETERANGAN
A. PERMASALAHAN		
1	Terlalu Besarnya Retribusi Pemakaian tanah untuk usaha ekonomi per tahun (e) Tambak Ikan/ Garam Satuan (M2) dengan Tarip Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) pada Perda No. 6 Tahun 2011	Perlu dilakukan appraisal, mengenai hal ini bersifat teknis dan telah terdapat ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik
2	Perlunya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset daerah dengan Dinas Perikanan sebagai pengguna barang di Revisi sesuai dengan Regulasi yang ada	Hal ini bersifat teknis dan telah terdapat ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik
B. POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM DIGALI		
1	Pemanfaatan Eksavator	Hal ini bersifat teknis dan telah terdapat ketentuannya dalam Peraturan Daerah
2	Aset Pelayanan Laboratorium Perikanan	

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN (DIM)
TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KETERANGAN
A. PERMASALAHAN		
1	Belum dilakukan penyesuaian tarif retribusi angkutan penyeberangan sejak tahun 2013	Telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Berpotensi ganda penarikan retribusi di bawean dengan Dishub Prov Jatim	
3	Peraturan perundangan sektor pengelolaan pelabuhan penyeberangan Bawean	
B. POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM DIGALI		
1	Potensi pendapatan dari retribusi pelabuhan Bawean	Telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang pajak daerah dan retribusi daerah
A. PERMASALAHAN		
1	Dengan adanya Undang-undang 1 tahun 2022 tidak diatur masalah penarikan retribusi kendaraan angkutan umum di terminal dan penarikan retribusi pengujian kendaraan bermotor, maka mulai tahun 2024 Dishub Kab Gresik tidak lagi memungut retribusi .	Telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang pajak daerah dan retribusi daerah
B. POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM DIGALI		

1	Pendapatan dari kendaraan keluar masuk terminal akan hilang	Telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2	Pendapatan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor akan hilang	

DAFTAR INVETARISASI PERMASALAHAN (DIM)
TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023
DINAS KOPERINDAG

NO	URAIAN	KETERANGAN
A. PERMASALAHAN		
UPT. PENGELOLAAN PASAR		
1	Regulasi (Perda/Perbup) Tentang Pasar sehat	Belum ada , dinas terkait akan mengajukan Rancangan Perda/Perbup
2	Regulasi Tentang Pengelolaan Tower Telekomunikasi di Area Pasar	Dinas terkait perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPPKAD (Aset), lalu memetakan mana yang merupakan kekayaan karena jika kekayaan daerah maka skema yang dilakukan adalah sewa
3	Regulasi Tentang Pengelolaan Ponten di Area Pasar	Belum ada
4	Penertiban PKL di Trotoar / Jalan Depan Pasar	bukan mengenai peraturan dan berkaitan dengan teknis pelaksanaan
5	Pemutihan Piutang Retribusi Pasar	Belum ada
6	SDM Pengelolaan Pasar (Keamanan / Kebersihan)	Belum ada
UPT. METROLOGI LEGAL		
1	Kurang Optimalnya Pelayanan untuk memenuhi permohanan	Kurangnya SDM yang dimiliki
2	Masih banyaknya potensi yang belum dapat di Akmodir	Kurangnya Peralatan Standar
3	Lambatnya pelayanan	Kurangnya Kendaraan Operasional
4	Peralatan Standar yang dimiliki Turun Kelas (Hasil dari Verifikasi Direktorat Metrologi	Ruangan Kurang Representatif
BIDANG. KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
1	Masih banyak koperasi yang dalam operasionalnya keluar dari prinsip koperasi sehingga pelayanan masih belum berbasis keanggotaan	Perlu adanya regulasi untuk memberikan sanksi administratif dan represif bagi koperasi yang berbasis non anggota
2	Masih banyak koperasi di lingkungan karyawanyang mengelola koperasinya dengan mengadopsi manajemen perusahaan sehingga tidak sesuai dengan jati diri koperasi	Perlu adanya regulasi bagi koperasi fungsional untuk mengimplementisasikan menejemen koperasi yang berbasis anggota
B. POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM DIGALI		
UPT. PENGELOLAAN PASAR		
1	Stand /Kios Lt.2 Pasar Sidomoro (115 Stand /Kios) sejak dibangun	Belum ada
UPT. METROLOGI LEGAL		
1	Belum adanya Ruang Lingkup yang dimiliki	Meter Air dan Flow Meter

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN (DIM)
TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023
DINAS PAREKRAFBUDPORA

NO	URAIAN	KETERANGAN
A. PERMASALAHAN		
1	Payung hukum untuk pendapatan belum mengikat	Hasil perumusan tidak sesuai dengan DIM yang diajukan (karena yang hadir bukan dari Bidang Pariwisata, namun dari Bidang Olahraga)
2	Belum adanya MoU antara Desa dengan Pemerintah (antara Desa Wisata dan Wisata Desa)	Terkait dengan sewa Gelora Joko Samudro untuk penggunaan oleh instansi pemerintah dan tarif sewa untuk PKL yang ada di WEP, merupakan masalah internal yang harus diatasi oleh Dinas terkait karena merupakan pelaksanaan.
B. POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM DIGALI		
1	Banyak aset milik Pemkab yang belum dimanafaatkan untuk tempat wisata	

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN (DIM)
TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	URAIAN	KETERANGAN
A. PERMASALAHAN		
Retribusi Pelayanan Persampahan		
1	Target pendapatan untuk retribusi persampahan terlalu besar, perda yang dipakai masih menggunakan tarif lama.	Perlu koordinasi yang intens antar-pimpinan (Dinas LH Kab Gresik dan Dinas Koperindag Kab Gresik) mengenai retribusi persampahan, karena telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan/atau Peraturan Bupati Gresik
2	Belum adanya mekanisme penarikan Retribusi diwilayah perkotaan	
3	Banyaknya Perusahaan/Industri yang masih tidak ikut berpartisipasi dalam membayar retribusi, dikarenakan merasa belum mendapatkan pelayanan dari DLH ataupun membuang sendiri ke TPA, Perda baru mengenai Retribusi Jasa Umum belum turun yang didalamnya terdapat revisi tentang besaran retribusi persampahan yang selama ini masih memakai perda tahun 4 tahun 2011 yang dinilai besarannya masih terlalu kecil,	
4	Belum optimalnya penarikan retribusi di pasar, dan perlu kerjasama dengan pengelola pasar dalam penarikan retribusi. Potensi Retribusi persampahan/kebersihan di pasar terhenti sejak 2018.	
5	Tidak adanya pengelolaan ditingkat Kelurahan / Desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di Desa, mengkoordinasi penarikan Retribusi Persampahan	
6	Pelayanan persampahan terhadap masyakat baik yang membayar ataupun tidak membayar retribusi, pelayanan akan tetap berjalan	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)		

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Kemampuan lab untuk pengambilan dan pengujian sampel perusahaan di Gresik masih sangat kecil apabila dibandingkan jumlah perusahaan yang ada, karena terkendala sumber daya peralatan Lab dan terbatasnya jumlah personil serta anggaran.	
B. POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM DIGALI		
Retribusi Pelayanan Persampahan		
1	Pelayanan langsung terhadap perusahaaan yang ingin membuang sampah	Perlu koordinasi yang intens antar-pimpinan (Dinas LH Kab Gresik dan Dinas Koperindag Kab Gresik) mengenai retribusi persampahan, karena telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan/atau Peraturan Bupati Gresik
2	Belum adanya Retribusi di wilayah Perkotaan	
3	Penarikan retribusi persampahan di pasar sekabupaten gresik	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium)		
1	Apabila dilakukan penambahan sumber daya peralatan Lab dan jumlah personil maka akan bisa menambah jumlah layanan ke Pelanggan/Perusahaan yang berdampak pada peningkatan PAD.	Perlu koordinasi yang intens antar-pimpinan (Dinas LH Kab Gresik dan Dinas Koperindag Kab Gresik) mengenai retribusi persampahan, karena telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan/atau Peraturan Bupati Gresik

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN (DIM)
TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	URAIAN	KETERANGAN
A. PERMASALAHAN		
1	Persyaratan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) masih dirasa memberatkan bagi pemohon	Direkomendasikan untuk melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah
2	Terbitnya ketetapan retribusi tergantung pada standar teknis	
3	Perekonomian yang belum kunjung stabil menyebabkan beberapa wajib retribusi mengajukan keringanan maupun tidak melanjutkan permohonan	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK Pasal 151 : "Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha tidak memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung sepanjang Badan Usaha telah menetapkan pedoman bangunan atau *estate regulation*"	
5	Masih diperlukan PKKPR Non Berusaha dan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di kawasan Perumahan	
6	Potensi Pendapatan yang berkurang akibat pemberlakuan regulasi retribusi bangunan gedung	
7	Sanksi bagi pelanggaran belum diterapkan secara optimal	
8	Terdapat kendala-kendala teknis yang masih harus dicarikan solusinya dengan berkonsultasi ke instansi vertikal	
B. POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM DIGALI		
1	Bangunan tambahan atau perluasan yang belum diajukan perizinan	Direkomendasikan untuk melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah
2	Piutang SKR yang belum dibayar (RP 741.790.584,78)	

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN (DIM)
TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023

NO	URAIAN	KETERANGAN
A. PERMASALAHAN		
BIDANG ASET		
1	Pemkab Gresik belum menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Tarif Pokok Sewa Aset sesuai hasil aprraisal seiring dengan telah terbitnya Perbub 62 Tahun 2022 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan	Perlu adanya penetapan SK Bupati tentang Tarif Pokok Sewa Aset sesuai hasil appraisal dari Penilai Pemeritah/Penilai Publik
B. POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM DIGALI		
1	Pemanfaatan aset hasil penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari pengembang perumahan	Permasalahan dimaksud sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik, hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan
2	Pendirian papan reklame/iklan/billboard di aset tanah Pemda yang lokasinya strategis	
3	Pendirian bangunan ATM Center di aset tanah Pemda yang lokasinya strategis	

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN (DIM)
TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023
RSUD IBNU SINA

NO	URAIAN	KETERANGAN
A. PERMASALAHAN		
1	Setelah diberlakukannya UHC di Kabupaten Gresik per Oktober 2022, jumlah kunjungan pasien meningkat sebesar ± 30% (Total kunjungan Tahun 2022 adalah 128.802, total kunjungan per Juni 2023 adalah 88.884), sementara itu tarif INA CBG's sebagai dasar pembayaran klaim BPJS Kesehatan lebih rendah dari Tarif Perbup sehingga menyebabkan kerugian rumah sakit ± 2-3 milyar perbulan.	Seluruh permasalahan yang diajukan oleh RSUD Ibnu Sina hanya mencantumkan permasalahan teknis yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupatan Gresik dan Peraturan Bupati Gresik
2	Kasus pasien tertentu seperti kecelakaan kerja (kriteria tertentu), orang terlantar, gangguan jiwa yang sebelumnya bisa diklaim melalui anggaran bansos, sekarang sudah tidak bisa sehingga menjadi piutang RSUD.	
3	Berkurangnya kunjungan pasien umum menyebabkan potensi pendapatan dari pasien umum juga menurun	
4	*Upgrade* SIM-RS dengan server terkini membutuhkan dukungan dana yang agak besar agar lebih aman, cepat dan tidak tertinggal dengan sistem rumah sakit lainnya. Karena dengan server yang sekarang, masih rentan dengan serangan hacker sehingga server menjadi lambat dan menyebabkan pelayanan, antrian online, SIM-RS dan E_Rekam Medis terkendala	
B. POTENSI PENDAPATAN YANG BELUM DIGALI		
1	Pembukaan pelayanan kesehatan BPJS Eksekutif (Kelas 1 dan 2) sore hari	Seluruh permasalahan yang diajukan oleh RSUD Ibnu Sina hanya mencantumkan permasalahan teknis yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupatan Gresik dan Peraturan Bupati Gresik
2	Optimalisasi pelayanan kesehatan dengan *mobileMedical Check Up*	
3	Penyesuaian Perdir Tarif untuk pelayanan *Medical Check Up*	
4	Peningkatan margin keuntungan untuk obat-obatan	
	Peningkatan efisiensi pelayanan BPJS untuk mengurangi kerugian	